PERAN *STAKHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA WISATA LEREP KABUPATEN SEMARANG

Lailliya Afrida Andriyani, Tri Yuniningsih, Titik Djumiarti

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: https://fisip.undip.ac.id E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Semarang Regency has become destination for tourists. The emergence of tourist saturation in visiting artificial tourist areas has given birth to a new concept of tourism known as village tourism. One of the tourist villages being developed by Semarang Regency Government is Lerep Tourism Village. However, the development of the Lerep Tourism Village has not yet reached an optimal level of development. Therefore, this research aims to identify stakeholders, analyze the role stakeholders, and analyze supporting&inhibiting factors in tourism development in the Lerep Tourism Village. Researchers used descriptive qualitative research methods. The research results show that the stakeholders involved in tourism development in the Lerep Tourism Village are divided into four categories, namely: key players, subjects, context setters, crowds. The role of stakeholders is divided into five types, namely: policy creator (Lerep Village Government, Dinas Pariwisata, and DISPERMASDES); coordinator (Dinas Pariwisata, DISPERMASDES, and BUMDES); facilitators (Dinas Pariwisata, DISPERMASDES, Lerep Village Government, Pokdarwis Rukun Santoso, PLN, BRI, JawaPos, and KKN UNDIP); implementers (Pokdarwis Rukun Santoso, Pokdarwis Indrokilo, Pokdarwis Soka, and Karang Taruna); and accelerators (Lerep Village Government, Pokdarwis Rukun Santoso, Karang Taruna Lerep Village, Jawa Pos Semarang, and KKN UNDIP). Then, the supporting factors in developing tourism in the Lerep Tourism Village consist of the creativity of the management and the existence of trust. Meanwhile, inhibiting factors consist of misunderstanding and lack of organizational strengthening. Recommendations that can be given are to improve relations between stakeholders and improve communication so that the development of the Lerep Tourism Village can run optimally.

Keywords: Tourism Village Development, Role of Stakeholders, Tourists.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan berkelanjutan dunia yang ditandatangani oleh 193 kepala negara pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan" yang terdiri dari 17 tujuan Pembangunan. Pariwisata berfungsi sebagai salah satu alat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sektor pariwisata berperan penting dalam mendukung tujuan SDGs ke 8 mengenai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta target ke 9 yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata

berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Oleh karena itu, intervensi dan konsistensi dari pemerintah diperlukan pada tata kelola kepariwisataan.

Seiring berjalannya waktu, perubahan kecenderungan berwisata pada saat ini diakibatkan oleh munculnya kejenuhan wisatawan untuk mengunjungi kawasan wisata buatan dan pada akhirnya melahirkan suatu minat wisata menjadi konsep baru berwisata yang dikenal dengan wisata pedesaan (desa wisata) (Mustabsirah, 2015). Menurut data dari BPS, Indonesia sendiri memiliki 83.843 desa/kelurahan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke pada tahun 2021. Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan desa/kelurahan terbanyak di Indonesia dengan jumlah 8.562 desa/kelurahan. Hal tersebut ditunjukkan oleh data sebagai berikut.

Tabel 1. Provinsi dengan Jumlah Desa/Kelurahan Terbanyak Tahun 2021

No.	Provinsi	Jumlah	Presentase
1.	Jawa Tengah	8.562	10,21%
2.	Jawa Timur	8.496	10,13%
3.	Aceh	6.516	7,77%
4.	Sumatera Utara	6.132	7,31%
5.	Jawa Barat	5.957	7,10%

Sumber : BPS (2021)

Pengembangan pariwisata melalui desa wisata di Jawa Tengah merupakan sektor yang juga sedang dikembangkan. Dasar hukum mengenai Desa Wisata di Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dimana dalam peraturan daerah ini pengembangan desa wisata meliputi pengembangan infrastruktur desa wisata, pemasaran desa wisata, penguatan kelembagaan desa wisata, dan kerjasama kemitraan. Pemerintah Kabupaten Semarang juga berupaya dalam mengembangkan desa wisata yaitu dengan adanya regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tahun 2020-2025.

Kabupaten Semarang merupakan daerah dengan jumlah desa wisata terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukkan oleh pendataan jumlah desa wisata tahun 2018 menurut kabupaten/kota. Dari 229 desa wisata yang terdata, Kabupaten Semarang merupakan kabupaten/kota dengan desa wisata terbanyak yaitu 30 desa wisata. Adapun desa wisata yang sedang dikembangkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Semarang salah satunya adalah Desa Wisata Lerep. Desa Lerep merupakan desa yang memiliki banyak potensi alam dan kearifan lokal yang layak untuk dikembangkan.

Regulasi mengenai Penetapan Desa Wisata Lerep diatur dalam Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/0217/2022 yang mana Desa Lerep ditetapkan menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Semarang. Tujuan adanya desa wisata yaitu untuk mendukung pengembangan kepariwisataan, memeratakan kesempatan kerja, mempelopori dan

mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat-istiadat, dan menjaga kelestarian alam. Strategi yang dilakukan Desa Wisata Lerep dalam rangka mencapai tujuan tersebut yaitu dengan memperkuat kelembagaan Pokdarwis, membuat tempat atau pusat kegiatan, mengembangkan paket wisata, serta meningkatkan fasilitas. Pencapaian strategi dalam rangka pengembangan Desa Wisata Lerep tersebut tentunya membutuhkan kerja sama dan kontribusi dari para *stakeholders*.

Apabila ditinjau dari pengembangan Desa Wisata Lerep terdapat permasalahan salah satunya terkait dengan kurangnya peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas pada Curug Indrokilo begitupula dengan loket yang belum berfungsi dengan baik. Kondisi Curug Indrokilo sangat memprihatinkan serta tidak terawat dengan baik. Sarana prasarana yang dibutuhkan seperti batas pengaman, tempat beristirahat, dan juga warung belum tersedia (Hidayah et al., 2024).

Gambar 1. Kondisi Sekitar Curug Indrokilo

Sumber : Dokumentasi Peneliti (2024)

Selanjutnya, penguatan kelembagaan Pokdarwis menjadi salah satu strategi dalam pengembangan pariwisata. Namun, lemahnya kelembagaan masih terjadi dalam dua Pokdarwis yang ada di Desa Wisata Lerep. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam susunan organisasi Pokdarwis Indrokilo Mulyo dan Pokdarwis Soka Ceria belum sesuai dengan ketentuan kelembagaan desa wisata yang tertulis dalam Buku Pedoman Desa Wisata oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Berikut akan disajikan tabel struktur organisasi pokdarwis yang ada di Desa Wisata Lerep.

Tabel 2. Struktur Organisasi Pokdarwis-Pokdarwis di Desa Wisata Lerep

No	Nama Pokdarwis	Struktur Organisasi
1.	Pokdarwis Rukun Santoso	Pelindung, Penasihat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Sie. Daya Tarik Wisata, Sie. Kuliner dan Souvenir, Sie. Humas Marketing, Sie. Acara, Sie. Seni Budaya, Sie. Perkap, Sie. Keamanan, Sie. Transportasi, Sie. Multimedia
2.	Pokdarwis Indrokilo Mulyo	Pelindung, Penasihat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota
3.	Pokdarwis Soka Ceria	Pelindung, Penasihat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota.

Sumber : Data diolah Peneliti (2023)

Selain itu, Pokdarwis Indrokilo Mulyo dan Pokdarwis Soka Ceria terbilang masih kurang dalam pengadministrasian dan koordinasi. Pengadministrasian yang kurang optimal dilihat dari Pokdarwis tersebut tidak melakukan pendataan jumlah kunjungan wisatawan, berbeda dengan Pokdarwis Rukun Santoso yang telah melakukan pendataan

jumlah wisatawan, yaitu pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan di Pokdarwis Rukun Santoso sebanyak 7.095 orang. Kemudian, terkait dengan kurangnya koordinasi dapat terlihat dari minimnya pengadaan rapat koordinasi dari Pokdarwis Indrokilo Mulyo dan Pokdarwis Soka Ceria apabila dibandingkan dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokdarwis Rukun Santoso yang sudah dihadiri oleh banyak pengurus. Berikut data mengenai rapat koordinasi pokdarwis dan jumlah pengurus yang hadir.

Tabel 3. Rapat Koordinasi Pokdarwis dan Jumlah Pengurus yang Hadir pada Juli – September Tahun 2023

No.	Nama Pokdarwis	Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Jumlah Pengurus yang Hadir
1.	Pokdarwis Rukun Santoso	19 Juli 2023 : Rapat Koordinasi (Persiapan dan koordinasi tamu mancanegara serta agenda santunan anak yatim)	25 orang
		26 Juli 2023 : Rapat Koordinasi (Sosialisasi inovasi paket, latihan bahasa Inggris dan pembagian kaos POKDARWIS)	20 orang
		8 Agustus 2023 : Rapat Koordinasi (Persiapan acara lomba kemerdekaan, laporan progress pembangunan, perbaikan administrasi, sosialisasi dari KKN)	16 orang
		29 Agustus 2023 : Rapat Koordinasi (Laporan pembangunan dan koordinasi kegiatan)	15 orang
		15 September 2023 : Rapat koordinasi (Laporan pembangunan, evaluasi kegiatan POKDARWIS, persiapan *launching*)	20 orang
2.	Pokdarwis Indrokilo Mulyo	Belum mengadakan rapat koordinasi	-
3.	Pokdarwis Soka Ceria	Belum mengadakan rapat koordinasi	-

Sumber : Data diolah Peneliti (2023)

Peran masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pariwisata terbilang kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kendala yang dihadapi oleh Pokdarwis Indrokilo Mulyo dalam hal ini yaitu sulitnya mencari masyarakat yang tertarik dalam pengembangan pariwisata. Pokdarwis Indrokilo Mulyo saat ini sedang dalam tahap penggalian potensi wisata alam baru berupa curug, tetapi dalam prosesnya menemui kendala yaitu sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dimana hanya berjumlah 4 orang yang ikut dalam kegiatan kerja bakti dari 856 penduduk di Dusun Indrokilo yang tercatat pada tahun 2022.

Kemajuan desa wisata tentunya perlu didukung dengan peran *stakeholders* yang baik untuk saling mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan strategi guna mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Namun, berdasarkan uraian sebelumnya, peran *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Lerep masih menemui kendala, sehingga dalam pelaksanaan strategi juga mengalami hambatan. Hal tersebut dapat berdampak pada belum tercapainya tujuan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis *stakeholders* berdasarkan perannya pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang. Hal tersebut dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian mengapa peran stakeholders dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep belum optimal? sehingga penelitian Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang.
3. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang.

D. Kajian Teori

Identifikasi *Stakeholders*

Stakeholders merupakan sekelompok orang atau lembaga yang memiliki perhatian maupun kepentingan dan pengaruh dalam suatu permasalahan yang ada sesuai menurut pendapat Fajri et al (dalam Maani et al., 2021). Gonsalves (dalam Maani et al., 2021) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang mempengaruhi atau terkena dampak kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan disebut sebagai pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa lembaga formal, perorangan, masyarakat, komunitas sosial ekonomi, atau lembaga dari berbagai strata masyarakat.

Teknik pemetaan dalam mengidentifikasi *stakeholders* yang dikemukakan Bryson (2004). Teknik analisis ini fokus utamanya adalah *power* dan *interest.* Menurut Bryson (2004) *power* diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki untuk membuat atau mempengaruhi suatu kebijakan, sedangkan *interest* diartikan sebagai kepentingan yang dimiliki terhadap pembuatan suatu kebijakan. Berikut akan disajikan matriks identifikasi *stakeholders* menurut Bryson (2004).

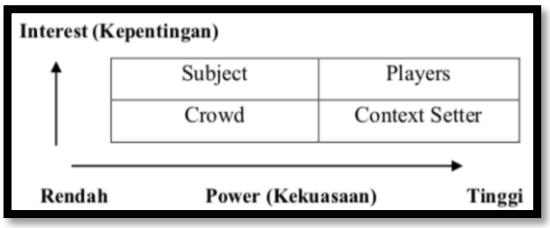

Gambar 2. Matriks Identifikasi *Stakeholders* menurut Bryson

Sumber : Bryson (2004)

Matriks berdasarkan kepentingan dan pengaruh tersebut akan mengkategorikan *stakeholders* ke dalam empat jenis yang meliputi *key player, subject, context setter,* dan *crowd.*

1. *Key Player*

   Key players merupakan *stakeholders* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan.

2. *Subject*

   Subject merupakan *stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi memiliki pengaruh yang rendah.

3. *Context Setter*

   Context setters merupakan *stakeholders* yang memiliki pengaruh yang tinggi, tetapi memiliki sedikit kepentingan.

4. *Crowd*

   Crowd merupakan *stakeholders* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan.

Peran *Stakeholders*

Stakeholders menurut David Viney (dalam Yuniningsih, 2019) adalah setiap orang yang terpengaruh oleh suatu keputusan dan memiliki kepentingan terhadap hasilnya, termasuk individu atau kelompok di dalam maupun di luar organisasi. Untuk menjamin kelancaran semua aktivitas, pihak berwenang sangat penting dalam struktur publik. Stakeholders sangat diperlukan dalam organisasi publik untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan lancar.

Menurut Nugroho (2014) peran *stakeholders* dapat diklasifikasikan menjadi :

1. *Policy creator*

   Stakeholders yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.

2. Koordinator

   Stakeholders yang berperan dalam mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat dalam kebijakan.

3. Fasilitator

   Stakeholders yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Fasilitas yang diberikan dapat berupa fasilitas fisik, dana, dan lain-lain.

4. Implementor

   Stakeholders sebagai pelaksana kebijakan dimana didalamnya termasuk kelompok sasaran.

5. Akselerator

   Stakeholders yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata ditinjau berdasarkan nilai, komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan. Hal tersebut sesuai dalam penelitian Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau (2020). Penjabaran dari keempat faktor

ialah sebagai berikut :

1. Nilai

Menurut Steeman (2013) nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, titik, tolak, dan tujuan hidup. Menurut Linda dan Riochard Eyre (1997) nilai adalah standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan bagaimana seseorang bertindak. Menurut Wart dalam (Hamida, 2022) nilai terbagi menjadi lima, yaitu nilai individu, nilai organisasi, nilai hukum, nilai kepentingan publik.

2. Komunikasi

Komunikasi yang efektif menjadi salah satu pendukung dalam hubungan kerjasama diantara *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata (Destiana et al, 2020). Komunikasi berkaitan dengan penyebaran informasi program yang akan dilaksanakan stakeholders untuk mencapai efisiensi pengembangan pariwisata. Menurut Sutardji dalam (Ginting et al., 2023) indikator komunikasi yang efektif yaitu dilihat dari pemahaman, pengaruh pada sikap, serta hubungan yang semakin baik.

3. Kepercayaan

Wayers (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi *stakeholders* bergantung pada hubungan yang saling percaya atau kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud ialah kepercayaan dari masing-masing aktor dalam menjalin hubungan dengan aktor lain guna mencapai tujuan atau kepentingan yang sama. Kepercayaan dalam pengembangan pariwisata dibangun dengan konsensus kolaboratif dan inklusif yang mempertimbangkan dimensi kepercayaan. Terdapat empat indikator kepercayaan menurut Maharani dalam (Ardianto et al., 2020), yaitu : keandalan, kejujuran, kepedulian, dan kredibilitas.

4. Kebijakan

Pengembangan pariwisata perlu didukung oleh regulasi yang mengatur penyelenggaraan wisata. Kebijakan pemerintah menjadi landasan stakeholders dalam pengembangan pariwisata (Judisseno, 2017), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan agar pihak di luar pemerintah memiliki acuan dalam pengembangan pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang

Stakeholders yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep dapat diidentifikasi menurut teori Bryson (2004) dengan kategorikan sebagai berikut.

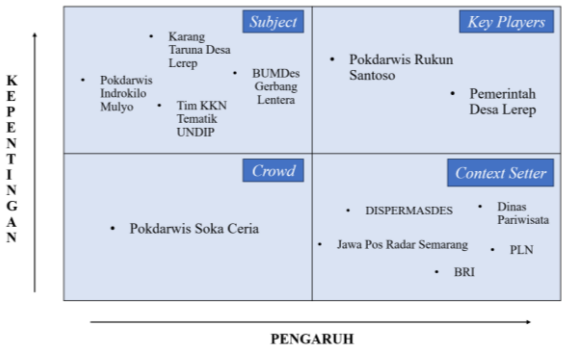

Gambar 3. Identifikasi *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang

Sumber : Data diolah Peneliti (2024)

1. *Key Players*

a. Pemerintah Desa Lerep

Pemerintah Desa Lerep memiliki kepentingan yang tinggi. Keterlibatan Pemerintah Desa Lerep yaitu dengan berupaya menjadi penggerak dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. Kepala Desa Lerep beserta dengan perangkat desa lainnya berupaya dalam mendirikan Desa Lerep menjadi desa wisata serta berusaha menyadarkan masyarakat mengenai desa wisata. Selain itu, Pemerintah Desa Lerep juga memiliki harapan dan aspirasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang.

Pada pengembangan Desa Wisata Lerep, Pemerintah Desa Lerep memiliki pengaruh yang besar. Wewenang yang dimiliki Pemerintah Desa Lerep yaitu sebagai penyusun kebijakan dan pengambilan keputusan. Apabila ditinjau dari kontribusi fasilitas, Pemerintah Desa Lerep memberikan fasilitas berdasarkan anggaran dana desa dengan prioritas yang ada. Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desa Lerep telah terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan dan Kepala Desa Lerep telah mengoptimalkan kinerja untuk mencapai hasil yang terbaik.

b. Pokdarwis Rukun Santoso

Pokdarwis Rukun Santoso dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Pokdarwis Rukun Santoso aktif terlibat sebagai pemandu wisata, sehingga pokdarwis mendapatkan manfaat dari keterlibatannya dalam pengembangan Desa Wisata Lerep, yaitu pihak pokdarwis merasa senang dapat berkontribusi dalam pengembangan desa wisata, mendapatkan

pendapatan dari kegiatan wisata, karena berperan sebagai pemandu wisata, serta dapat membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan solidaritas.

Apabila ditinjau dari segi pengaruh, Pokdarwis Rukun Santoso sebagai organisasi, para anggotanya juga berwenang menjual paket wisata berdasarkan potensi yang ada di Desa Wisata Lerep. Pokdarwis Rukun Santoso juga berpengaruh yaitu dengan aktif memfasilitasi ketika ada lomba, pihak pokdarwis akan menggiatkan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan pemberian anggaran, Pokdarwis Rukun Santoso juga ikut serta yaitu dengan memberikan iuran pada awal merintis kegiatan paket wisata.

2. *Subjects*

Pihak yang berperan sebagai *subjects* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang terdiri dari BUMDes Gerbang Lentera, Pokdarwis Indrokilo Mulyo, Karang Taruna Desa Lerep, serta Tim KKN Tematik UNDIP dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

a. BUMDes Gerbang Lentera

BUMDES memiliki harapan jumlah wisatawan semakin banyak, sehingga perekonomian masyarakat Desa Lerep meningkat. Harapan BUMDES dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Lerep. Adanya pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep tentunya dapat memberikan manfaat bagi BUMDES, yaitu yaitu memperoleh pemasukan dari unit pariwisata Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) diharuskan menyetor ke BUMDES. BUMDES berupaya dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. Ketua BUMDes menyediakan lokasi pelaksanaan paket wisata sebelum dibangunnya Sekretariat Pokdarwis Rukun Santoso.

Selanjutnya apabila ditinjau dari segi pengaruhnya, BUMDES Gerbang Lentera memiliki pengaruh yang rendah dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. BUMDES tidak berkontribusi dalam pemberian fasilitas maupun pemberian anggaran dana dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. Apabila ditinjau dari sumber daya manusia yang dilibatkan, BUMDES tidak berfokus hanya pada pengembangan pariwisata. BUMDES tidak begitu melibatkan pengurusnya dalam bidang pariwisata, karena BUMDES memiliki banyak unit.

b. Pokdarwis Indrokilo Mulyo

Pokdarwis Indrokilo Mulyo adalah salah satu pokdarwis yang ada di Desa Wisata Lerep dan berkedudukan di Dusun Indrokilo. Pokdarwis Indrokilo Mulyo memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang rendah dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. Pokdarwis Indrokilo Mulyo sedang berupaya dalam perbaikan akses jalan di Curug Indrokilo. Pihak pokdarwis juga merencanakan akan

membangun Pasar Mangga Mampir. Selanjutnya apabila ditinjau dari segi pengaruh, Ketua Pokdarwis Indrokilo memiliki kedudukan dan kewenangan yang tidak terlalu berpengaruh dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep, karena pariwisata di Indrokilo sendiri belum sepenuhnya berjalan.

c. Karang Taruna Desa Lerep

Karang taruna dalam upaya pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep yaitu berpartisipasi dengan menjadi anggota Pokdarwis, memimpin tari penyambutan tamu, ikut serta dalam pawai obor, membantu kegiatan Paguyuban Supir Lerep (PSL), membantu dalam dokumentasi kegiatan pariwisata, serta membantu dalam pengelolaan media sosial Desa Wisata Lerep. Apabila ditinjau dari segi pengaruh, dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki, Ketua karang taruna Desa Lerep memiliki wewenang yang terbatas dalam pengembangan Desa Wisata Lerep, yaitu hanya pada lingkup remaja. Karang taruna sifatnya hanya mendukung program desa dan menyelenggarakan program yang berkaitan dengan remaja.

d. Tim KKN Tematik UNDIP

Mahasiswa KKN memiliki kepentingan dalam menjalankan kegiatan untuk memenuhi mata kuliah KKN melalui keberhasilan program yang mereka jalankan. Dengan pelaksanaan kegiatan KKN, mahasiswa mendapat manfaat yaitu dapat lebih mengenal dan berkontribusi dalam pengembangan Desa Wisata Lerep serta sebagai salah satu wujud pemenuhan mata kuliah. Upaya yang dilakukan Tim KKN Tematik UNDIP yaitu dengan menyelenggarakan program kerja. Apabila ditinjau dari segi pengaruh, wewenang TIM KKN dalam pengembangan Desa Wisata Lerep terbilang terbatas hanya pada penyelenggaraan program dan mengundang masyarakat untuk pelatihan, karena status mereka sebagai peserta program sementara dan keterbatasan dalam hal otoritas dan sumber daya, pengaruh mereka terhadap keputusan strategis dan jangka panjang dalam pengembangan desa wisata cenderung rendah.

3. *Context Setters*

a. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Dinas Pariwisata tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam pengembangan Desa Wisata Lerep, Dinas Pariwisata bukan hanya fokus pada Desa Wisata Lerep, tetapi juga meninjau perkembangan keseluruhan desa wisata di Kabupaten Semarang. Selain itu Dinas Pariwisata juga memiliki urusan-urusan lain yang perlu dikelola selain mengenai desa wisata. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga secara luas yang ditujukan kepada desa wisata di Kabupaten Semarang yaitu dengan memberikan sosialisasi ataupun bimtek.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

memiliki kedudukan sebagai pembuat kebijakan dalam pengembangan desa wisata. Dinas Pariwisata berwenang merumuskan peningkatan kelas atau kategori desa wisata dengan melibatkan tim khusus. Mereka juga memiliki wewenang dalam menyusun peraturan, menyelenggarakan pembinaan serta bimbingan teknis. Dinas Pariwisata juga berkontribusi dalam pemberian anggaran dana, Desa Wisata Lerep pernah mendapat 1 miliar untuk proyek Kafe Joglo, gedung, dan sarana kesenian pada tahun 2020.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang

DISPERMASDES sebagai salah *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Lerep juga melakukan upaya tetapi terbatas. Upaya yang dilakukan yaitu dengan terlibat dalam pembuatan kebijakan serta memberikan sosialisasi kepada BUMDes di Kabupaten Semarang, sehingga bukan hanya fokus kepada BUMDes Gerbang Lentera Lerep. DISPERMASDES memiliki kedudukan yang berpengaruh yaitu berkontribusi sebagai pembuat kebijakan dan regulasi, mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi BUMDes dalam pengembangan desa wisata. DISPERMASDES memiliki wewenang yaitu mengarahkan BUMDes dalam desa wisata dan berkontribusi dalam membuat kebijakan di tingkat Kabupaten Semarang.

c. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

PLN tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata di Lerep Kontribusi PLN hanya berfokus pada pemberian bantuan yang dapat mendukung kegiatan desa wisata. Kemudian bantuan yang telah diberikan juga dibebaskan kepada desa terkait akan dimanfaatkan menjadi apa saja. Kedudukan PLN sebagai salah satu BUMN yang membantu dalam pengembangan Desa Wisata Lerep terbilang dapat memberi pengaruh berkat kontribusi yang diberikan berupa bantuan dana kepada Desa Wisata Lerep. Bantuan dari PLN sangat signifikan, terbukti dengan adanya berbagai fasilitas yang telah dibangun, yaitu berupa tenda, kolam renang, dan *greenhouse*.

d. Jawa Pos Radar Semarang

Jawa Pos Radar Semarang adalah media massa yang berkontribusi dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. Media massa sendiri juga menerima menfaat tetapi hanya sebatas mendapat bahan berita untuk ditulis dan mendapat pengetahuan dari pengamatan kondisi secara langsung dan wawancara dengan pihak terkait. Apabila ditinjau dari segi pengaruh, Jawa Pos sebagai media massa yang paling sering digunakan oleh Desa Wisata Lerep, kedudukannya memiliki arti penting dalam mendukung kegiatan Desa Wisata Lerep. Media massa dapat menjangkau secara luas dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Lerep, sehingga efektif untuk

memperkenalkan daya tarik dan keunggulan desa wisata. menjadi tulisan yang akan disampaikan kepada pembaca.

4. *Crowds*

Stakeholder yang tergolong dalam *crowd* yaitu Pokdarwis Soka Ceria. Pokdarwis Soka adalah pokdarwis yang berkontribusi pada awal pembentukan Desa Wisata Lerep. Namun, saat ini Pokdarwis Soka Ceria sudah kurang aktif dalam pengembangan Desa Wisata Lerep, sehingga mereka tidak lagi menerima manfaat dari kemajuan Desa Wisata Lerep. Pokdarwis Soka Ceria juga tidak berkontribusi dalam pemberian fasilitas ataupun dana. Kemudian, sejak pandemi hingga kini, kapasitas SDM dalam Pokdarwis Soka Ceria terbilang tidak optimal, pokdarwis tersebut sudah minim kegiatan. Selain itu, tata kelola di Pokdarwis Soka juga dinilai kurang baik.

B. Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang

1. *Policy Creator*

a. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Dinas Pariwisata berperan dalam memberikan usulan di tingkat kabupaten dan memberi nasihat kepada desa terkait pengelolaan desa wisata, termasuk pembentukan pokdarwis dan struktur organisasi. Selanjutnya, kebijakan di tingkat desa dibuat oleh desa itu sendiri dengan keterlibatan Kepala Desa. Dinas Pariwisata juga berperan sebagai penilai beserta tim khusus untuk menilai dan menentukan kategori desa wisata di Kabupaten Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tergolong sebagai *policy creator*, karena berperan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan *stakeholder* yang meninjau perkembangan BUMDES, dalam Desa Wisata Lerep sendiri, BUMDES merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam pengembangannya. Bidang yang menaungi BUMDES yaitu Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa. DISPERMASDES terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Semarang serta dalam penyusunan Peraturan Bupati mengenai BUMDES untuk menindaklanjuti Perda, Peraturan Bupati nantinya akan menjelaskan secara teknis. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang tergolong sebagai *policy creator*, karena berperan dalam penyusunan kebijakan terutama mengenai kebijakan yang berkaitan dengan BUMDES.

c. Pemerintah Desa Lerep

Pemerintah Desa Lerep memiliki peran dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di Desa Wisata Lerep. Pemerintah

Desa Lerep berperan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, contohnya dalam pengalokasian dana untuk pengembangan desa wisata. Pemerintah Desa Lerep dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, salah satunya melalui proses musyawarah desa (musdes) yaitu dengan mengundang kepala dusun dan tokoh masyarakat. Sebelum itu, Pemerintah Desa Lerep bersama dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mengunjungi delapan dusun terlebih dahulu..

2. Koordinator

a. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Dinas Pariwisata mengkoordinasikan program dan bantuan pariwisata dari pemerintah pusat ataupun provinsi di tingkat kabupaten, bukan hanya di Desa Wisata Lerep, tetapi seluruh desa wisata di Kabupaten Semarang. Pihak lain juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata mengenai kebutuhan yang akan dibantu oleh Dinas Pariwisata. Apabila memungkinkan, Dinas Pariwisata akan melakukan sinkronisasi antara program Dinas Pariwisata dengan kebutuhan desa wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Semarang.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang

DISPERMASDES berperan dalam mengkoordinasikan program dari provinsi atau kementerian terutama terkait BUMDES untuk tingkat kabupaten. Arahan dari pemerintah pusat ataupun provinsi akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan pada tingkat kabupaten dengan menyampaikan kepada desa terkait, contohnya bimtek dari Balai Besar yang bekerja sama dengan DISPERMASDES. Anggaran program tersebut dari Balai Besar dan DISPERMASDES bertugas menjadi koordinator yaitu dengan menyampaikan serta mengundang peserta agar dapat hadir.

b. BUMDes Gerbang Lentera

BUMDES berperan dalam rangka menyelaraskan kebutuhan unit-unit di bawahnya dengan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan potensi wisata desa secara berkelanjutan. BUMDES memiliki unit-unit di bawahnya yaitu unit pariwisata, unit catering, unit pengelolaan sampah, unit internet, unit pengolahan sampah, dan togoro (toko gotong royong). BUMDES berperan sebagai koordinator dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep yaitu dengan mengkoordinasikan unit-unit di bawahnya serta berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan RT-RT.

3. Fasilitator

a. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Dinas Pariwisata berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep yaitu dengan dengan sosialisasi dan bantuan keuangan. Sosialisasi

yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata yaitu terkait dengan manajemen pokdarwis. Adapun pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pokdarwis oleh Dinas Pariwisata diantaranya mengenai tata kelola *homestay*, tata kelola desa wisata, peran pokdarwis, pelatihan tentang kepemanduan, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai bantuan keuangan, ada bantuan keuangan yang diberikan dari pemerintah kepada Desa Wisata Lerep melalui Dinas Pariwisata, misalnya pada tahun 2020 Desa Wisata Lerep menerima bantuan 1 miliar rupiah. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk Pembangunan.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang memfasilitasi desa dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terutama kepada BUMDES. Jika ada regulasi baru, seperti PP 11 Tahun 2021 tentang BUMDES, DISPERMASDES mengundang perwakilan desa guna melakukan sosialisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga memfasilitasi bagi desa wisata untuk melakukan konsultasi, yang dapat dilakukan melalui panggilan, pesan, ataupun bertanya secara langsung saat DISPERMASDES melakukan monitoring.

c. Pemerintah Desa Lerep

Peran yang dilakukan yaitu dengan penyediaan fasilitas fisik dalam rangka pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. Penyediaan fasilitas tersebut diperoleh dari dana desa dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas yang ada. Pemberian anggaran disesuaikan dan difokuskan pada prioritas kebutuhan. Pada awal pembentukan Desa Wisata Lerep sebagai fasilitator, pemerintah desa juga mamfasilitasi dengan memberikan pemahaman dan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada.

d. Pokdarwis Rukun Santoso

Peran yang Pokdarwis Rukun Santoso lakukan yaitu dengan menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan serta memfasilitasi pelatihan yang memberdayakan masyarakat lokal untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pokdarwis Rukun Santoso menyediakan dukungan dan sumber daya dengan mendampingi dan melatih dalam lomba KWT yang mana Pokdarwis Rukun Santoso ikut berperan dalam pelatihan dan pembuatan materi.

e. BUMN (PLN dan BRI)

PLN dan BRI sebagai Badan Usaha Milik Negera memiki peran sebagai fasilitator dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang. Peran yang dilakukan oleh PLN yaitu memfasilitasi dalam pemberian dana. Pokdarwis menerima bantuan dari PLN

sebesar 400 juta, Bantuan dari PLN telah menghasilkan banyak fasilitas di Desa Wisata Lerep. Beberapa di antaranya adalah tiga tenda, kolam renang, dan *greenhouse*. Sama hal nya dengan PLN, BRI juga memberi dana sebesar 500 juta untuk pengembangan Desa Wisata Lerep.

f. Jawa Pos Radar Semarang

Jawa Pos Radar Semarang berkontribusi sebagai fasilitator yaitu dengan menyediakan *platform* dan wartawan guna menyebarkan informasi akurat tentang potensi pariwisata dan perkembangan terbaru di Desa Wisata Lerep. Dengan liputan yang menarik, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan keunikan desa wisata serta dapat mengundang wisatawan.

g. Tim KKN Tematik UNDIP

Tim KKN Tematik UNDIP berperan dalam memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat Desa Lerep diantaranya pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan membuat *ecoenzym* dan *ecobrick*, menginisiasi dan pembinaan proklim di Dusun Indrokilo, serta sosialisasi dan pembuatan produk lokal seperti susu bubuk dan selai kopi. Pihak UNDIP juga memberikan fasilitas fisik betupa laptop dan *drone*.

4. Implementor

a. Pokdarwis Rukun Santoso

Pokdarwis Rukun Santoso bertanggung jawab dalam pelaksanaan paket wisata di Desa Wisata Lerep, khususnya di Dusun Lerep. Adapun contoh paket wisata yang diselenggarakan oleh Pokdarwis Rukun Santoso diantaranya paket *half day*, paket *one day*, paket *live in*, paket *gathering*, dan lain-lain. Pokdarwis Rukun Santoso berperan dalam mengelola paket wisata dan melayani wisatawan. Pokdarwis Rukun Santoso juga bersedia untuk berkolaborasi dengan pokdarwis lain untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan paket wisata.

b. Pokdarwis Indrokilo Mulyo

Pokdarwis Indrokilo Mulyo berkontribusi dalam pengembangan Desa Wisata Lerep sesuai dengan arahan dari Kepala Desa yaitu dengan melaksanakan program penyempurnaan Curug Indrokilo dan membangun Pasar Mangga Mampir. Apabila upaya perbaikan jalan telah dilakukan, nantinya Pokdarwis Indrokilo Mulyo juga akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wisata Lerep. Namun dalam keberjalanannya, belum berjalan secara optimal, sehingga perlu dukungan lebih.

d. Pokdarwis Soka Ceria

Kegiatan yang ada di Pokdarwis Soka Ceria meliputi pembuatan hasta karya, penghijauan, pembuatan pupuk, pemilahan sampah, serta ternak maggot. Kemudian untuk paket wisata yang tersedia bagi

wisatawan yaitu mengenai pengolahan sampah serta pembuatan hasta karya. Namun, sejak pandemi keterlibatan anggota Pokdarwis Soka Ceria semakin menurun. Peran yang dilakukan oleh Pokdarwis Soka Ceria dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep terbilang kurang aktif.

e. Karang Taruna Desa Lerep

Karang Taruna yaitu sebagai penyelenggara kegiatan untuk generasi muda dan menjadi wadah kreativitas generasi muda untuk mengembangkan tanggung jawab sosial. Peran yang dilakukan karang taruna yaitu dengan berpartisipasi dalam kegiatan wisata seperti pawai obor, bentuk kegiatannya yaitu dengan berkeliling dusun di Desa Wisata Lerep pada malam hari. Mereka juga membantu Paguyuban Supir Lerep dalam penjemputan tamu karena bus tidak bisa masuk.

5. Akselerator

a. Pemerintah Desa Lerep

Pemerintah Desa Lerep dapat berperan sebagai penggerak dan penjamin keberhasilan pengembangan Desa Wisata Lerep. Pemerintah Desa Lerep dapat memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mempercepat pengembangan potensi wisata, serta meningkatkan kualitas infrastruktur. Pemerintah Desa Lerep aktif dalam mengikutsertakan Desa Lerep untuk mengikuti lomba. Hal tersebut dilakukan agar Desa Wisata Lerep semakin dikenal.

b. Pokdarwis Rukun Santoso

Pokdarwis Rukun Santoso berperan dalam mempercepat pengembangan Desa Wisata Lerep dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan, menjaga keramahtamahan, dan membuat konten promosi menarik. Kemudian, anggota pokdarwis juga terus berinovasi dalam menyediakan paket wisata dan menambah pengetahuan melalui sosialisasi.

c. Karang Taruna Desa Lerep

Karang Taruna Desa Lerep turut berpartisipasi dalam mempercepat pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep yaitu dengan pemasaran dan menjadi *talent* dalam konten media sosial. Mereka juga mengembangkan promosi dengan membuat narasi, tulisan, dan paparan yang bermanfaat bagi Lerep. Partisipasi ini membantu Desa Wisata Lerep semakin dikenal luas. Karang Taruna terlibat dalam memperkuat promosi Desa Wisata Lerep melalui media sosial. Ketua Karang Taruna juga aktif mengunggah kegiatan desa wisata yang dapat mengundang banyak kunjungan tamu.

d. Jawa Pos Radar Semarang

Peran utama Jawa Pos Radar Semarang adalah sebagai media massa yang berkontribusi melalui pemberitaan. Wartawan Jawa Pos Radar Semarang berkontribusi

dalam memberikan liputan menarik dan informatif untuk memperkenalkan Desa Wisata Lerep kepada masyarakat serta meningkatkan minat dan kunjungan wisatawan. Media massa dengan jangkauan luas tentunya dapat membantu menyampaikan informasi akurat serta membantu wisatawan merencanakan kunjungan mereka dengan baik.

e. Tim KKN Tematik UNDIP

Tim KKN Tematik UNDIP tergolong sebagai akselerator dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. Tim KKN Tematik UNDIP dapat mempercepat pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep melalui pelatihan pembuatan produk lokal, inisiasi proklim, dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan diantaranya mengenai *ecoenzyme, ecobrick,* susu bubuk, dan selai kopi. Hal tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat serta terbukanya peluang ekonomi baru.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang

1. Faktor Pendukung

a. Nilai

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep memiliki faktor yang menjadi pendukung dalam pengembangannya, salah satunya dari nilai. Faktor pendukung nilai dapat ditinjau dari peran Kepala Desa Wisata Lerep yang mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta mengembangkan Desa Wisata Lerep dan terjun langsung ke warganya untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Pokdarwis Rukun Santoso sebagai salah satu organisasi yang ada di Desa Wisata Lerep juga memiliki nilai-nilai yang mendukung dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep. Pokdarwis Rukun Santoso telah berhasil mendorong wisatawan untuk berkunjung dan terus berinovasi serta aktif mengikuti sosialisasi.

a. Kepercayaan

Kepercayaan dapat terbangun berkat adanya sinkronisasi dan komunikasi yang baik antar stakeholders. Dalam hal ini, telah terjadi hubungan kepercayaan yang baik antara Pemerintah Desa Lerep dengan Pokdarwis Rukun Santoso. Hal ini terbukti dari Pokdarwis Rukun Santoso yang percaya kepada Pemerintah Desa Lerep pada awal pembentukan Desa Wisata Lerep. Pokdarwis Rukun Santoso percaya kepada kepemimpinan Kepala Desa Lerep bahwa Desa Lerep akan dapat berkembang menjadi desa wisata. Selanjutnya kepercayaan juga dapat terbangun dari stakeholders pemerintah dan media massa. Kepala Desa Lerep dapat saling percaya dan membina hubungan yang baik dengan wartawan Jawa Pos Radar Semarang.

b. Kebijakan

Kebijakan menjadi penting dalam pengembangan pariwisata karena sifatnya sebagai pedoman penyelenggaraan pariwisata. Kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Semarang No. 556/0217/2022 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Semarang. SK tersebut digunakan sebagai dasar hukum penetapan Desa Lerep sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Semarang. Pada tingkat Desa Wisata Lerep terdapat Keputusan Kepala Desa Lerep Nomor: 141/16/2022 tentang Perubahan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "Gerbang Lentera" dan Keputusan Kepala Desa Lerep Nomor: 141/19/2022 tentang Penetapan Susunan Pengurus Kelompok Sadar Wisata Rukun Santoso. Keputusan tersebut dijadikan acuan dalam ruang gerak BUMDes dan Pokdarwis Rukun Santoso dan dapat berjalan dengan baik.

2. Faktor Penghambat

Pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep terdapat hambatan pada komunikasi. Kendala terjadi antara Kepala Desa Lerep dengan Pokdarwis Indrokilo Mulyo, pokdarwis tersebut masih enggan bergerak dan belum ada tindakan yang signifikan. Selain itu, kurangnya komunikasi juga terjadi antara Pokdarwis Rukun Santoso dan Pokdarwis Soka Ceria. Pokdarwis Soka Ceria belum siap berpartisipasi dalam pengembangan wisata, padahal paket wisata pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan sedang dibutuhkan oleh wisatawan. Kendala komunikasi juga terjadi diantara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan BUMDES Gerbang Lentera, yang mana BUMDES Gerbang Lentera belum rutin berkomunikasi serta memberikan laporan yang seharusnya menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban.

PENUTUP

Kesimpulan

Stakeholders yang terlibat dalam mewujudkan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep terdiri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Lerep, BUMDes Gerbang Lentera, Pokdarwis Rukun Santoso, Pokdarwis Indrokilo Mulyo, Pokdarwis Soka Ceria, BUMN, Tim KKN Tematik UNDIP, serta Jawa Pos Radar Semarang. *Stakeholders* yang terlibat tersebut diidentifikasikan menjadi *key player*, *subject*, *context setter*, serta *crowd*.

Stakeholders tersebut juga dikategorikan berdasarkan peran yang dimilikinya yaitu *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, serta akselerator. *Stakeholders* yang berperan sebagai *policy creator* yaitu Pemerintah Desa Lerep, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Semarang. *Stakeholders* yang berperan sebagai koordinator yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dan BUMDES Gerbang Lentera.

Stakeholders yang berperan sebagai fasilitator yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Lerep, Pokdarwis Rukun Santoso, PLN, BRI, Jawa Pos Radar Semarang, dan Tim KKN Tematik UNDIP. *Stakeholders* yang berperan sebagai implementor yaitu Pokdarwis Rukun Santoso, Pokdarwis Indrokilo Mulyo, Pokdarwis Soka Ceria, serta Karang Taruna Desa Lerep.

Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep yaitu adanya kepercayaan dan kreativitas pengurus Pokdarwis Rukun Santoso. Sedangkan, faktor penghambat dalam kebijakan ini yaitu kesalahpahaman, kurangnya penguatan organisasi, serta kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Saran

1. Setiap *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep supaya menjalankan tugas pokok fungsi masing-masing *stakeholders* secara maksimal, sehingga pengembangan pariwisata dapat berkembang dengan optimal.
2. *Stakeholders* yang terlibat perlu melakukan kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholders*, terutama diantara Pemerintah Desa Lerep dengan Pokdarwis Indrokilo Mulyo dan Pokdarwis Soka Ceria, yaitu dengan cara menambah intensitas pertemuan dan kegiatan bersama yang secara khusus membahas kendala yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep.
3. *Stakeholders* pelaksana yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan daya kreativitas dengan mengikuti berbagai pelatihan serta aktif terlibat dalam kegiatan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Keban, Y. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu* (3rd ed.). Gava Media.

Lembaga Administrasi Negara. (2017). *Modul Pelatihan Lanjutan Analis Kebijakan*.

Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik* (10th ed.). Alfabeta.

Jurnal

Ardianto, K., Nuriska, F. P., & Nirawati, L. (2020). Pengaruh Kepercayaan Dan Ulasan Produk Terhadap Minat Beli Ulang Emina Pada Official Store Shopee Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, *2*(2), 62.

Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar *Stakeholder* dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, *4*(2), 221-234.

Bryson, J. M. (2004). *What To Do When*

Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review, 6(1), 21-53.

Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *9*(4), 159-175.

Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 8(2), 132-153.

Ginting, S. P. N., Harahap, N. J., & Halim, A. (2023). Pengaruh Kompetensi, Komunikasi, Pengembangan Karir dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, *4*(4), 2969-2978.

Hidayah, F. F., Yuliyanto, E., Nurdiana, L., & Salmah, S. (2024). Pengelolaan Potensi Desa Wisata: Integrasi Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Masyarakat Indrokilo Desa Lerep. *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *3*(1), 58-64.

Lailia, I., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2021). Peran *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal of Public Policy And Management Review*, *10*(3), 194-207.

Maani, K. D., Fajri, H., Wahyuni, N., & Malau, H. (2021). Collaborative Governance sebagai Solusi dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, *7*(2).

Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi, S. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, *5*(1).

Saeed, A. F., & Kasim, N. (2019). Role of Stakeholders in Mitigating Disaster Prevalence: Theoretical Perspective. In *MATEC Web of Conferences* (Vol. 266, p. 03008). EDP Sciences.

Tretyak, V. P., Rekun, G. P., Andreieva, K. O., & Bieliai, M. S. (2019). The Role Of Stakeholders' Interests Management Mechanism in the Transport Services Market Development. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 67, p. 06053). EDP Sciences.

Yuniningsih, T., Suwitri, S., & Soesilowati, E. (2018). *The Analysis of Network Actors in the Policy Implementation of Developing Tourism in Semarang City*. *Journal of Environmental Management & Tourism*, *9*(6 (30)), 1210-1218.

Laporan

BPS. (2022). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi.

Kemenparekraf. (2023). Desa Wisata Lerep Ungaran Barat Kabupaten Semarang. https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/lerep.

Peraturan

Desa Lerep. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lerep Tahun 2019-2025.

Dinas Pariwisata. Rencana Strategi Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.